

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jilbab telah menjadi salah satu simbol identitas umat Islam saat ini. Pemakaian jilbab di Indonesia yang beraneka macam model dan bentuknya merupakan sebuah fenomena yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Beda cerita dengan kondisi perempuan muslim di masa lalu. Dimana alur sejarah menyoroti perjalanan di tahun 1980-an pada perjuangan umat muslim ketika munculnya kasus-kasus pelarangan jilbab. Pada saat itu penggunaan jilbab yang kini lebih dikenal sebagai hijab belum mencapai popularitas saat ini.

Perkembangan istilah jilbab tidak hanya merujuk pada upaya mendefinisikan perlindungan perempuan untuk melindungi tubuhnya dari tindakan jahat laki-laki, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mencerminkan identitas sosial serta nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.¹ Tradisi penggunaan jilbab di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak masa sebelum kemerdekaan. Bukti awalnya dapat ditemukan pada periode kedatangan Islam di Nusantara, di mana jilbab dikenakan oleh keturunan langsung para pedagang Arab dan Gujarat. Seiring dengan terjadinya akulturasi budaya dan semakin luasnya penerimaan Islam di kalangan masyarakat pribumi, penggunaan jilbab pun menjadi semakin meluas.²

Menurut Fedwa El Guindil, jilbab merupakan fenomena yang memiliki banyak makna.³ Jilbab dapat berperan sebagai media alat untuk menyampaikan berbagai pesan sosial dan budaya. Setiap agama pada dasarnya memiliki pandangan tersendiri mengenai penggunaan jilbab. Bagi umat Kristen, jilbab berfungsi sebagai simbol penting yang memiliki makna ideologis yang mendalam. Sedangkan

¹ Budiastuti, "Jilbab dalam Perspektif Sosiologi" Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Tesis Universitas Indonesia*, 2012. Hlm. 30.

² Sakinah, "Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya", *Ayan* 8, No. 5, 2019. Hlm. 55.

³ Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1999. Hlm. 30.

penganut Katolik beranggapan jilbab dianggap sebagai representasi dari pandangan tentang perempuan dan nilai-nilai kesalehan.⁴

Disisi lain, pencapaian maraknya penggunaan jilbab di Indonesia hingga saat ini tentu memiliki dinamika yang tidak sederhana. Polemik tersebut dilatar belakangi ketika terjalinnya hubungan antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam telah menjadi sorotan utama para ahli sosial dan politik. Seperti halnya di periode-periode sebelumnya, hubungan antara negara dan umat Islam selama masa Orde Baru mengalami dinamika yang berfluktuasi. Pada awalnya, kedua pihak menjalin kerja sama, namun seiring waktu, muncul ketegangan dan konflik yang akhirnya diikuti dengan upaya rekonsiliasi dan saling mengakomodasi.⁵

Pemerintahan Orde Baru yang sangat berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi berusaha untuk menerapkan kontrol yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekspresi keagamaan. Pemerintah mencurigai segala bentuk gerakan politik Islam yang dianggap dapat mengancam integrasi nasional dan stabilitas pemerintahan. Orde Baru lebih mengedepankan pendekatan sekuler dalam mengelola urusan negara, dengan berusaha memisahkan agama dari politik.⁶

Kondisi sosial-politik Indonesia pada era Orde Baru juga diwarnai dengan pengendalian ketat terhadap media dan kebebasan berbicara. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai tindakan subversif, terutama jika menyentuh isu-isu sensitif seperti agama. Orde Baru juga sangat berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan kelompok-kelompok Islam, mengingat sejarah panjang ketegangan antara negara dan gerakan Islam politik.⁷ Kebijakan negara yang cenderung sekuler sering kali berbenturan dengan aspirasi umat Islam,

⁴ A. C. Budiati, "Jilbab: Gaya Hidup Kaum Hawa", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No. 1, April, 2001. Hlm. 60.

⁵ Leni Nuraeni dan Setia Gumilar, "Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Pelajar Putri pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991", *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, vol. 14, no. 1, 2019, hlm. 165.

⁶ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996, hlm. 355.

⁷ Ibid.

terutama terkait isu-isu seperti kebebasan berpakaian dan ekspresi keagamaan di ranah publik.

Di saat yang bersamaan pada akhir tahun 1970-an dunia menyaksikan munculnya Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, menggantikan rezim monarki Pahlavi dengan pemerintahan teokratis Islam. Revolusi ini tidak hanya membawa perubahan politik di Iran, tetapi juga mempengaruhi kesadaran keagamaan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.⁸ Salah satu dampak signifikan dari revolusi ini adalah kebangkitan semangat identitas keislaman, khususnya di kalangan perempuan Muslim, yang terlihat dari maraknya penggunaan jilbab sebagai simbol komitmen terhadap ajaran agama. Revolusi Iran menjadi inspirasi bagi umat Islam di Indonesia untuk lebih menunjukkan identitas keislaman mereka di tengah situasi politik yang cenderung sekuler.

Revolusi Iran yang meletus pada tahun 1979 membawa dampak hingga terasa di Indonesia. Berdasarkan temuan Suzzane Branner, pengaruh revolusi tersebut mulai terlihat pada dekade 1980-an, dimana penggunaan jilbab di Indonesia kian meluas sebagai bagian dari kebangkitan identitas keislaman.⁹ Meningkatnya penggunaan jilbab di Indonesia dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai ancaman terhadap stabilitas dan harmoni nasional. Pemerintah pada masa itu menerapkan kebijakan sekularisme yang tegas, di mana segala bentuk ekspresi keagamaan yang dianggap berlebihan dapat dicurigai sebagai gerakan radikal yang berpotensi mengganggu kestabilan politik.¹⁰

Maraknya penggunaan jilbab, terutama di kalangan generasi muda, dipandang sebagai bagian dari pengaruh radikalisme Islam yang muncul setelah Revolusi Iran. Kekhawatiran ini diperkuat oleh peran Iran sebagai negara yang

⁸ Hendi Johari, "Ketika Indonesia Takut Revolusi Iran", *Historia.id* (2021), dalam <https://historia.id/politik/articles/ketika-indonesia-takut-revolusi-iran-DWjR2>. Diakses pada 29 September 2024.

⁹ Sakinah, "Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya", *Ayan* 8, No. 5, 2019. Hlm. 55.

¹⁰ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 32.

mempromosikan ideologi politik Islam yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Orde Baru untuk menegakkan asas Pancasila.¹¹

Dalam hal ini pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, memandang Revolusi Iran sebagai sebuah ancaman potensial, terutama terkait dengan pengaruh ideologi Islam yang dianggap radikal. Pemerintah khawatir bahwa revolusi tersebut akan mempengaruhi umat Islam di Indonesia untuk mengadopsi sikap yang lebih militan terhadap negara, terutama dalam menuntut penerapan hukum Islam. Pengaruh ini terlihat dari munculnya tren penggunaan jilbab sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi kebijakan sekuler di Indonesia.

Melihat situasi tersebut pemerintah mengambil sikap yang tegas terhadap segala bentuk ekspresi keagamaan yang dianggap berlebihan, termasuk penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri dengan memberlakukannya SK No. 052/C/Kep/D.82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 17 Maret 1982.¹² Walaupun tidak ada pernyataan tertulis jelas pelarangan penggunaan jilbab atau kerudung, namun kebijakan sekolah terkesan menjadikan SK 052 tersebut sebagai landasan bagi pihak sekolah untuk “mengharamkan” pemakaian jilbab oleh siswi-siswi di sekolah.¹³ Darisini mulai merambaknya kasus-kasus pelarangan jilbab di Indonesia. Banyak bukti menunjukkan tentang kebijakan sekolah yang memberi hukuman kepada siswi berjilbab hingga kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Sejak diberlakukannya SK 052 tahun 1982 tersebut hingga puncak kasus yang melonjak tinggi pada tahun 1988 tentunya umat Islam tidak diam begitu saja.¹⁴

Orde Baru dengan seluruh kebijakan yang diberlakukannya, tidak jarang menimbulkan penolakan dan memicu ketegangan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk ketidakpuasan itu muncul melalui penentangan terhadap Surat Keputusan

¹¹ Heri Setiawan, "Kuasa Jilbab: Studi Kritis Perkembangan Jilbab di Indonesia," *Skripsi, Universitas Airlangga*, 2008. Hlm. Vii.

¹² SK 052/C/KepD.82

¹³ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, "Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991", Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007. Hlm. 33.

¹⁴ Kiblat. 6-19 November 1989, *Suara Mereka Yang Berjilbab*.

No. 02/C/Kep/D/1982 yang membatasi penggunaan jilbab. Kebijakan ini mendorong terjadinya aksi kolektif berskala besar dan melibatkan ribuan masyarakat khususnya umat Islam yang mengekspresikan keresahannya dalam bentuk perlawanan. Aksi kolektif yang semula muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial yang lebih luas. Gerakan ini bertujuan untuk melawan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Pembatasan kebebasan individu yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dipandang sebagai upaya untuk menjaga kestabilan politik, dengan dalih untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah.¹⁵

Di tengah kontrol politik yang ketat, umat Islam di Indonesia mulai merasakan kebutuhan untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka secara lebih terbuka. Kebijakan pelarangan penggunaan jilbab ini mendapat tentangan luas dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.¹⁶ Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan Muslim yang ingin menjalankan kewajiban agamanya. Penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat seiring dengan semakin banyaknya kasus siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena menolak melepas jilbab mereka.¹⁷

Pada periode antara tahun 1982 hingga 1991, kebijakan pelarangan terhadap penggunaan jilbab di Indonesia menjadi salah satu isu kontroversial yang mencuat di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Penolakan terhadap kebijakan ini semakin meluas, mencakup berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga organisasi keagamaan. Gerakan perlawanan tersebut muncul dalam pelbagai bentuk reaksi, dimulai dari beberapa tulisan yang dimuat dalam berita media pers Islam, seperti Majalah Panji Masyarakat, Majalah Kiblat, Majalah Suara Muhammadiyah, dan pers umum yang termuat dalam Majalah Tempo, Surat

¹⁵ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995. Hlm. 21-22.

¹⁶ Panji Masyarakat. No. 615, 21-30 Juni 1989, *Mereka Menuntut Hak untuk Berjilbab*.

¹⁷ Panji Masyarakat. No. 1614, 11-10 Juni, 1989, *Kontroversi Melarang Jilbab*.

Kabar Kompas yang berisikan berita dan kritikan terhadap kebijakan pelarangan jilbab. Bentuk-bentuk penolakan dan kritik tidak hanya datang melalui tulisan majalah, tetapi tulisan buku karya Emha Ainun yang berisikan puisi Lautan Jilbab. Dunia seni musik juga tidak mau kalah untuk mengekspresikan kritik penolakannya terhadap kebijakan pelarangan jilbab.

Meskipun menghadapi penolakan, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan menjaga kesatuan dan netralitas di lingkungan sekolah. Namun, kebijakan ini justru memicu reaksi balik yang lebih kuat dari kalangan umat Islam. Mereka melihat pelarangan jilbab sebagai bentuk sekularisasi yang dipaksakan oleh negara dan sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama. Akibatnya, reaksi penolakan tersebut membentuk sebuah gerakan pro-jilbab yang semakin berkembang dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat khususnya umat Islam.

Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun penolakan dan respon penolakan kolektif dilakukan secara serius terhadap kebijakan pelarangan jilbab, maka pada tahun 1991 pemerintah mencabut kebijakan tersebut dengan merevisi SK 052 tahun 1982 dan dikeluarkannya SK Dirjen Pendidikan Menengah dan Menengah Atas (Dirjen Dikmen) berupa Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991 tepatnya pada 16 Februari tahun 1991. Oleh karena itu, tahun yang dipilih dalam judul penelitian ini mencakup periode pelarangan jilbab, yaitu dari dikeluarkannya kebijakan dalam SK 052 tahun 1982 hingga dicabutnya kebijakan tersebut pada tahun 1991.

Dengan demikian, penolakan terhadap kebijakan larangan penggunaan jilbab tahun 1982 berkembang menjadi gerakan kolektif umat Islam dalam memperjuangkan kebebasan beragama di bawah tekanan rezim Orde Baru. Melalui berbagai bentuk penolakan, dukungan organisasi Islam, dan peran media, umat Islam menunjukkan solidaritasnya hingga akhirnya berhasil mendorong pencabutan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk penolakan, aktor yang terlibat, serta dinamika sosial-politik yang mendasarinya selama periode 1982–1991.

Pemilihan judul yang berfokus pada representasi penolakan umat Islam terhadap kebijakan pelarangan jilbab, dengan mengkaji pemberitaan dari majalah

Kiblat, *Panji Masyarakat*, dan *Tempo*, bukan hanya ditujukan untuk memotret dinamika sejarah sosial-keagamaan di masa Orde Baru, tetapi juga bertujuan untuk menghadirkan pendekatan analisis yang lebih tajam melalui studi komparatif media. Pendekatan ini dipilih karena masing-masing media tersebut mewakili karakter ideologis dan audiens yang berbeda, sehingga memungkinkan diperolehnya perspektif yang beragam dan lebih menyeluruh atas satu peristiwa sejarah yang sama.

Analisis komparatif ini juga memperkuat validitas interpretasi sejarah, sebab dalam konteks rezim otoriter seperti Orde Baru, media memiliki fungsi ganda: sebagai corong negara sekaligus sebagai ruang resistensi. Dengan membandingkan pola pemberitaan dari berbagai media, akan terlihat bagaimana dinamika resistensi terhadap kebijakan diskriminatif tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat sipil secara langsung, tetapi juga dari para aktor intelektual dan jurnalis yang mengartikulasikan perlawanan secara naratif.

Selain itu, pendekatan komparatif ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang historiografi media dan studi gerakan sosial, karena mampu menampilkan bagaimana strategi wacana dipakai oleh berbagai pihak dalam memperjuangkan kebebasan beragama di tengah tekanan politik negara. Perbandingan isi, gaya penyampaian, intensitas pemberitaan, dan respons publik melalui media akan mengungkapkan bagaimana media berperan aktif dalam membentuk persepsi masyarakat dan memperkuat solidaritas kolektif terhadap isu jilbab yang saat itu menjadi simbol perlawanan kultural umat Islam terhadap dominasi negara.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya sekadar menjadi dokumentasi sejarah pelarangan jilbab, tetapi juga berfungsi sebagai kajian reflektif tentang relasi antara negara, agama, dan media dalam lanskap sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap tiga majalah dengan karakteristik berbeda ini menjadi sangat penting dalam memahami spektrum respons umat Islam secara lebih luas dan beragam terhadap kebijakan yang mengekang ekspresi keagamaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah mengenai penolakan umat Islam terhadap kebijakan pelarangan jilbab dalam pemberitaan

majalah Kiblat, Panji Masyarakat dan Tempo tahun 1982-1991. Untuk mempermudah fokus kajian, permasalahan tersebut dijabarkan melalui beberapa bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana awal mula munculnya kebijakan larangan penggunaan jilbab di Indonesia tahun 1982-1991 ?
2. Bagaimana penolakan umat Islam terhadap kebijakan larangan penggunaan jilbab dalam pemberitaan Majalah Kiblat, Panji Masyarakat dan Tempo tahun 1982-1991 ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana reaksi penolakan umat Islam terhadap kebijakan pelarangan jilbab dari tahun 1982-1991. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menguraikan awal mula munculnya kebijakan larangan jilbab di Indonesia tahun 1982-1991.
2. Menguraikan penolakan umat Islam terhadap larangan jilbab dalam pemberitaan Majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo tahun 1982-1991.

D. Kajian Pustaka

Selama penelitian, penulis menemukan beberapa sumber kajian pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas, di antaranya sebagai berikut :

1. Buku: Dengan judul “*Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991*”, karya Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, cetakan pertama oleh Al-I’tishom Cahaya Umat tahun 2001. Buku ini mengulas tentang dinamika sosial perkembangan penggunaan jilbab di Indonesia yang diiringi pergulatan politik didalamnya, sehingga buku ini juga mengupas secara kronologis pembahasan mengenai kasus-kasus pelarangan jilbab khususnya di sekolah-sekolah daerah Jabodetabek dan keterlibatan pemerintah Orde Baru tahun 1980-an hingga awal 1990-an dengan

diberlakukannya kebijakan pelarangan jilbab dalam SK 052 serta adanya respon dan sikap peran media juga ormas Islam atas kebijakan tersebut.¹⁸ Adapun penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda, yakni menelaah bagaimana penolakan umat Islam terhadap pelarangan jilbab direpresentasikan dalam pemberitaan tiga majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo sebagai bentuk konstruksi wacana di media massa..

2. Buku: Dengan judul "*Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*", karya Abdul Aziz Thaba, cetakan pertama Gema Insani Press tahun 1996. Buku yang ditulis melalui pendekatan sejarah ini menyoroti sebuah kondisi sosial yang membentuk hubungan kompleks antara Islam dan negara Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Juga mengungkap adanya kebijakan yang cenderung mengendalikan dan membatasi organisasi Islam dalam peran politik. Buku ini juga menjelaskan sejarah pasang surut dan pemikiran politik Islam di Indonesia dengan gambaran adanya dinamika tarik ulur kekuasaan yang pada akhirnya terjadi implikasi peran umat Islam terhadap politik pemerintah Orde Baru.¹⁹ Namun, apa yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat ialah fokus masalah penulis hanya menyoroti kondisi sosial dan politik pada masa Orde Baru yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan pelarangan jilbab di Indonesia. Penulis akan menggali lebih dalam bagaimana kebijakan tersebut memicu penolakan yang sangat spesifik dari umat Islam.
3. Skripsi: Dengan judul "*Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991*". Skripsi yang ditulis oleh Ela Nurlatifah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 tersebut menjelaskan tentang sejarah perkembangan penggunaan jilbab di Indonesia serta respon pemerintah dan masyarakat pada masa Orde Baru. Dan berujung pada pandangan bahwa jilbab bukan lagi sebatas busana melainkan sebagai simbol dan alat perjuangan identitas dan

¹⁸ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, "*Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991*", Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

¹⁹ Abdul Azis Thaba, "*Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*", Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

politik.²⁰ Melalui pendekatan sejarah, buku ini menguraikan dinamika tarik-ulur kekuasaan dan upaya negara dalam mengendalikan organisasi Islam. Meskipun relevan sebagai latar belakang, buku ini tidak secara khusus membahas respons umat Islam terhadap kebijakan pelarangan jilbab. Penelitian ini berangkat dari konteks yang sama, namun lebih menitikberatkan pada bagaimana penolakan umat Islam atas larangan jilbab direpresentasikan dalam pemberitaan media, khususnya Majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo sepanjang 1982–1991.

4. Skripsi: Dengan judul *“Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pelarangan Jilbab di Kota Bandung Tahun 1980-2000”*. Dalam skripsi karya Fitri dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan menggunakan metode penelitian sejarah ini berusaha mengungkap bagaimana peraturan seragam sekolah yang diterapkan pada siswa sesuai pada kebijakan pemerintah yang memunculkan banyak kasus tentang isu pelarangan jilbab serta berbagai respon dari kalangan masyarakat khususnya di wilayah Bandung dalam menanggapi kebijakan tersebut.²¹ Adapun penulis mengambil fokus yang berbeda, yaitu menelaah bagaimana penolakan umat Islam terhadap larangan jilbab direpresentasikan dalam pemberitaan media pada tingkat nasional, khususnya melalui Majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo sepanjang 1982–1991, sehingga cakupan wilayah dan objek kajian menjadi lebih luas serta berorientasi pada konstruksi wacana media
5. Skripsi: Dengan judul *“Puisi Lautan Jilbab Sebagai Gerakan Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru 1982-1991”*, karya Muh Alima’sum Syarief pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Salatiga ini mengkaji bagaimana puisi digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pelarangan jilbab pada masa Orde Baru sekaligus menjadikan puisi sebagai alat perjuangan

²⁰ Ela Nurlatifah, *“Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991”*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²¹ Fitri, *“Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pelarangan Jilbab di Kota Bandung Tahun 1980-2000”*, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

untuk hak perempuan muslim dalam menggunakan jilbab.²² Penelitian tersebut menempatkan karya sastra sebagai bagian dari gerakan budaya yang menentang dominasi negara terhadap ekspresi religius. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis akan menelaah bentuk penolakan umat Islam secara lebih luas, tidak hanya melalui karya sastra, tetapi juga melalui pemberitaan dan opini dalam media massa seperti Majalah Kiblat, Panji Masyarakat, dan Tempo pada periode 1982–1991.

6. Skripsi berjudul “*Pemberitaan Pelarangan Jilbab dalam Majalah Tempo (1982–1991)*” karya Sumi Fitria dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024 mengkaji bagaimana Majalah Tempo memberitakan kebijakan pelarangan jilbab pada masa Orde Baru. Penelitian tersebut menyoroti isi dan arah pemberitaan Tempo serta menunjukkan bagaimana media arus utama merepresentasikan isu jilbab di tengah tekanan rezim saat itu. Adapun penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan membandingkan pemberitaan dari tiga majalah, yaitu Tempo, Kiblat, dan Panji Masyarakat, untuk melihat beragam bentuk penolakan umat Islam terhadap kebijakan pelarangan jilbab dari sudut pandang media dengan latar ideologis yang berbeda pada kurun waktu yang sama.
7. Skripsi : Dengan judul *Kebijakan Pelarangan Penggunaan Jilbab di Sekolah Negeri dalam Pemberitaan Media Panji Masyarakat Tahun 1982–1991*” karya Rio Adianata dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024) mengkaji bagaimana Majalah Panji Masyarakat memberitakan kebijakan pelarangan jilbab yang diberlakukan di sekolah-sekolah negeri selama masa Orde Baru. Penelitian tersebut memfokuskan analisis pada satu media Islam dan menelusuri narasi serta sikap kritis yang ditunjukkan terhadap kebijakan negara. Sementara itu, penelitian ini akan memperluas cakupan dengan membandingkan bagaimana penolakan umat Islam terhadap larangan jilbab direpresentasikan dalam tiga media sekaligus Majalah Kiblat, Panji

²² Muh Alima'sum Syarief, “Puisi Lautan Jilbab sebagai Gerakan Perlawanan terhadap Rezim Orde Baru 1982-1991”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2024.

Masyarakat, dan Tempo sebagai analisis komparatif pemberitaan dari berbagai spektrum sepanjang tahun 1982 hingga 1991.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis menggunakan metode sebagai alat untuk membantu penelitian agar berjalan secara terarah. Pengertian metode tidak hanya mencakup langkah-langkah teknis, tetapi juga menunjukkan cara peneliti dalam mengkaji dan memahami masalah secara ilmiah.²³ Dengan sebuah metode, proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data dapat dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu pendekatan yang berfokus pada penelusuran peristiwa masa lalu melalui sumber tertulis, lisan, atau arsip, yang kemudian dianalisis dan disusun berdasarkan fakta sesuai yang konteks ditemukan.

Adapun metode penelitian sejarah dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama dimulai dengan menentukan topik yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti mengumpulkan berbagai sumber atau dikenal sebagai tahap heuristik. Langkah berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber yang merupakan tahap penilaian terhadap keaslian dan keabsahan sumber yang telah diperoleh. Kemudian, peneliti melakukan interpretasi dengan menganalisis dan menyusun makna dari berbagai informasi yang ditemukan. Dan tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah.²⁴

1. Heuristik

Tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah disebut heuristik. Tahap heuristik merupakan tahapan yang berfokus pada pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang sesuai dengan topik kajian.²⁵ Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan peninggalan-peninggalan dan catatan-catatan dalam bentuk tertulis, lisan, maupun karya seni.²⁶ Sedangkan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

²³ Heliuss Samsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Ombak, 2007. Hlm, 9.

²⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. Hlm. 69

²⁵ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014. Hlm. 95.

²⁶ Heliuss Samsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Ombak, 2007. Hlm, 62-63.

sumber tertulis seperti dokumen dan arsip, sumber lisan seperti wawancara atau cerita langsung, serta sumber benda seperti artefak atau peninggalan fisik. Beberapa sumber juga dikategorikan sebagai sumber visual, misalnya foto dan gambar.

Selain itu, sumber sejarah juga dibedakan menjadi dua berdasarkan tingkat keterlibatan pelaporinya. Sumber primer atau sumber pertama adalah sumber asli yang berasal dari orang yang mengalami atau menyaksikan langsung suatu peristiwa, baik secara langsung dengan pancaindra atau melalui alat bantu seperti rekaman. Sedangkan sumber sekunder atau sumber kedua merupakan informasi yang disampaikan oleh pihak yang tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita orang lain.²⁷ Berdasarkan klasifikasi ini, berbagai sumber yang berkaitan dengan tema dan judul dalam penelitian telah dikumpulkan sebagai bagian dari proses heuristik.

a) Sumber Primer

1) Sumber Tertulis

a. Arsip : Salinan digital naskah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 17 Maret 1982 oleh Prof. Darmodiharjo, S. H.

b. Majalah

1. Kiblat. 08 September 1984. *Kerudung Lagi: Mana Toleransi Itu ?*
2. Kiblat. 6-19 November 1989. *Racun Nodai Jilbab!*
3. Kiblat. 6-19 November 1989. *Meski Disiksa Tak Merasa Sakit.*
4. Kiblat. 6-19 November 1989. *Suara Mereka Yang Berjilbab.*
5. Panji Masyarakat. No. 353, 1-11 Maret 1982. *Triwulandari dilarang Memakai Kerudung di Sekolah.*
6. Panji Masyarakat. No. 356, 14 April 1982. *Pejuang di Balik Kerudung.*

²⁷ Ibid.

7. Panji Masyarakat. No. 389, 1-11 Maret 1983. *Penjelasan Tentang Show Wulandari.*
8. Panji Masyarakat. No. 389, 1-11 Maret 1983. *Jilbab dan MUI.*
9. Panji Masyarakat. No. 389, 1-11 Maret 1983. *Jilbab Belum Mulus Juga.*
10. Panji Masyarakat. No. 419, 1-11 Januari 1984. *Peragaan Busana Muslim di Purwokerto untuk Membangkitkan Minat Remaja Memakai Jilbab.*
11. Panji Masyarakat. No. 458, 1-11 Februari 1985. *Wajib Jilbab SMP MH Lampung.*
12. Panji Masyarakat. No. 543, 21 Juni 1987. *Janji Golkar dan Jilbab.*
13. Panji Masyarakat. No. 578, 11-20 Juni 1988. *Kasus Jilbab yang Memilukan.*
14. Panji Masyarakat. No. 592, 1-10 November 1988. *Jilbab Bogor ke Pengadilan.*
15. Panji Masyarakat. No. 594, 21-20 November 1988. *Perkara Jilbab Bogor (I,II, III).*
16. Panji Masyarakat. No. 595, 1-10 Desember 1988. *Jilbab Perlu Kesepakatan Fuad-Hasan Basri.*
17. Panji Masyarakat. No. 595, 1-10 Desember 1988. *Menguji Jilbab Bogor.*
18. Panji Masyarakat. No. 600, 21-31 Januari 1989. *Lagi, Siswi Berkerudung di-PHK.*
19. Panji Masyarakat. No. 600, 21-31 Januari 1989. *UU Anti Jilbab di Kendari.*
20. Panji Masyarakat. No. 600, 21-31 Januari 1989. *Tak Habis-habisnya Kami di Ledek...! Catatan Harian Siswi Berjilbab.*
21. Panji Masyarakat. No. 509. 21-30 April 1989. *Jilbab dan Seragam Sekolah Tak Perlu Dipertentangkan.*
22. Panji Masyarakat. No. 602, 21-31 Mei 1989. *Surat untuk Siswi Berjilbab.*
23. Panji Masyarakat. No. 604, 1-10 April 1989. *Resep "Kasus Jilbab".*
24. Panji Masyarakat. No. 607, 1-10 April 1989. *Sebuah Perintah Dzalim.*
25. Panji Masyarakat. No. 609, 21-30 April 1989. *Jilbab Bukan untuk Pembeda.*
26. Panji Masyarakat. No. 614, 11-10 Juni 1989. *Kontroversi Melarang Jilbab.*
27. Panji Masyarakat. No. 629, 11-21 November 1989. *Tragedi Jilbab.*

28. Panji Masyarakat. No. 607, 1-10 April 1989. *Longgarkan untuk Jilbab.*
29. Panji Masyarakat. No. 607, 1-10 April 1989. *Di Pengadilan Pemerintah Bisa Kalah.*
30. Panji Masyarakat. No. 607, 1-10 April 1989. *Kerudung Hak Warga Negara.*
31. Panji Masyarakat. No. 679, 1-10 April 1991. *Jilbab dan Kristenisasi.*
32. Panji Masyarakat. No. 679, 1-10 April 1991. *Insan Kamil dengan Jilbab.*
33. Panji Masyarakat. No. 679, 1-10 April 1991. *Setelah Jilbab di Bebaskan.*
34. Panji Masyarakat. No. 699, 21-31 Oktober 1991. *Berjilbablah, Kapan Lagi.*
35. Panji Masyarakat. No. 699, 21-31 Oktober 1991. *Jilbab dan Wanita.*
36. Tempo. 11 Desember 1982. *Larangan Buat Si Kudung.*
37. Tempo. 11 Agustus 1984. *Tahun Ini Batas Kerudung.*
38. Tempo. 20 Oktober 1984. *Faktor X Dalam Kerudung.*
39. Tempo. 04 Februari 1984. *Lagi, Soal Jilbab.*
40. Tempo. 04 Februari 1984. *Larangan Foto Berjilbab*
41. Tempo. 18 Februari 1984. *Jilbab: Pemahaman Perintah Islam*
42. Tempo. 13 Januari 1990. *GTM Setelah Jilbab.*
43. Tempo. 1 Desember 1990. *Boleh Berjilbab di Serambi Mekah.*
44. Tempo. 19 Januari 1991. *Seragam Harus, Jilbab Boleh.*
45. Suara Muhammadiyah. No. 20/62. 1982.

2) Sumber Gambar

- a) Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 11 Desember 1982. *Aktivitas di Halaman Masjid Salman Bandung.*
- b) Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 20 Oktober 1984. *Siswi Berkerudung Sebuah SMA di Bandung.*
- c) Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 1 Desember 1990. *Para Siswi Menuntut Bebas Berjilbab.*
- d) Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 19 Januari 1991. *Protes Siswi Berjilbab di Mahkamah Agung*
- e) Gambar di kolom opini Majalah Panji Masyarakat. 1-11 Februari 1983. *Para Peserta Putri dengan Bangga Bisa Menggunakan Jilbab.*

- f) Gambar di kolom opini Majalah Panji Masyarakat. 11-21 November 1989.
Kita Tak Relia Jilbab di Fitnah.
- g) Gambar di kolom Majalah Panji Masyarakat. 11-20 Desember 1989.
Liberte, Egalite, Fraternalite.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah jenis sumber sejarah yang tidak berasal dari orang yang mengalami atau menyaksikan secara langsung suatu peristiwa. Biasanya sumber sekunder disebut sebagai sumber kedua karena biasanya dikutip berdasarkan sumber-sumber pertama, sehingga sumber sekunder tidak juga berasal dari yang sezaman. Seiring waktu, isi dari sumber sekunder sering dijadikan rujukan oleh penulis lainnya, sehingga muncul lagi sumber ketiga, keempat, dan seterusnya.²⁸

1. Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, “*Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991*”, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
2. Abdul Aziz Thaba, “*Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
3. Ela Nurlatifah, “*Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991*”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

2. Kritik

Setelah semua sumber atau data sejarah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau yang sering disebut kritik sumber. Tahapan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menilai keabsahan informasi dari data yang telah diperoleh, agar dapat dipastikan mana yang benar-benar dapat dijadikan fakta sejarah. Dalam proses ini, seorang peneliti tidak bisa langsung menerima isi dari setiap sumber begitu saja, melainkan harus mengujinya secara kritis. Kritik atau verifikasi sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern yang menilai

²⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Ombak, 2007. Hlm, 68.

kealian dan kondisi fisik sumber, serta kritik intern yang menelaah isi atau kandungan informasinya. Dengan tahapan ini, informasi sejarah dapat disaring secara objektif dan akurat sebelum disusun dalam bentuk penulisan.²⁹

a) Kritik Ekstern

1) Sumber Tertulis

- a. Arsip : Salinan digital naskah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 17 Maret 1982 oleh Prof. Darmodiharjo, S. H.
- b. Majalah
 1. Kiblat. 08 September 1984. *Kerudung Lagi: Mana Toleransi Itu ?* Tulisan hasil scan foto ini masih sangat layak untuk dibaca. Namun, hanya selembor robekan kertas yang ditemukan di Perpustakaan Batu Api Jatinangor.
 2. Panji Masyarakat. No. 578, 11-20 Juni 1988. *Kasus Jilbab yang Memilukan*. Tulisan hasil scan foto ini masih sangat layak untuk dibaca. Tulisan yang termuat dalam bundelan kertas majalah Panji Masyarakat tidak terdapat cacat seperti robek ataupun pudar dan terdapat di Perpustakaan Nasional Indonesia.
 3. Tempo. 19 Januari 1991. *Seragam Harus, Jilbab Boleh*. Tulisan hasil scan foto ini masih sangat layak untuk dibaca. Tulisan yang termuat dalam bundelan kertas Majalah Tempo tidak terdapat cacat seperti robek ataupun pudar dan terdapat di Perpustakaan Nasional Indonesia.

²⁹ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, Depok: Prenadamedia Group, 2018. Hlm. 223.

2) Sumber Gambar

- a. Gambar di kolom opini Majalah Panji Masyarakat. No. 386, 1-11 Februari 1983. *Para Peserta Putri dengan Bangga Mengenakan Jilbab*. Gambar ini masih sangat jelas meskipun dicetak dalam format hitam-putih khas majalah tahun 1980-an. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, atau noda pada bagian gambar maupun teks pendukungnya. Tampak para siswi mengenakan jilbab dengan ekspresi percaya diri, sesuai dengan judul opini. Gambar ini terdapat dalam arsip cetak Majalah Panji Masyarakat yang sudah berbentuk bundelan buku dan disimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional Indonesia.
- b. Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 20 Oktober 1984. *Siswi Berkerudung sebuah SMA di Bandung*. Gambar dokumentasi ini masih dalam kondisi baik dan dapat dibaca dengan jelas meskipun tidak berwarna. Tidak ada kerusakan seperti lipatan besar, robekan, atau bagian yang terhapus. Gambar ini menampilkan siswi-siswi berjilbab dalam latar sekolah, yang menunjukkan suasana keseharian di tengah polemik pelarangan jilbab saat itu. Gambar ini berasal dari edisi cetak Tempo dan tersedia dalam arsip Majalah Tempo yang sudah dibentuk buku dalam satu bundelan serta menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia.
- c. Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 19 Januari 1991. *Protes Siswi Berjilbab di Mahkamah Agung*. Gambar ini tercetak cukup jelas dan memperlihatkan ekspresi protes dari sekelompok siswi yang membawa poster di depan gedung Mahkamah Agung. Walaupun hanya berwarna hitam-putih, detail gambar masih dapat dikenali dan tidak mengalami kerusakan serius. Gambar ini menjadi salah satu dokumentasi penting terkait dinamika hukum dan kebijakan jilbab pada masa Orde Baru. Arsip gambar ini tersedia dalam versi cetak Tempo dan dapat diakses di Perpustakaan Nasional Indonesia.

b) Kritik Internal

1) Sumber Tertulis

a. Arsip : Salinan digital naskah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 17 Maret 1982 Prof. Darmodiharjo, S. H.

b. Majalah

1. Kiblat. 08 September 1984. *Kerudung Lagi: Mana Toleransi Itu ?*
Tulisan ini mengangkat suara salah satu orang yang menyuarakan tentang penolakannya terhadap kebijakan pelarangan jilbab. Dalam narasi yang ditulisnya ini menyoroti ketidakadilan dan minimnya sikap toleransi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama terhadap siswi yang memilih mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitas dan kebebasan beragama mereka. Dalam artikel tersebut, tergambar konflik antara kebijakan pemerintah yang membatasi ekspresi keagamaan dengan keinginan umat Islam untuk memperoleh penghormatan atas hak mereka dalam menjalankan.
2. Panji Masyarakat. No. 578, 11-20 Juni 1988. *Kasus Jilbab yang Memilukan.*

Tulisan ini memuat berita tentang kasus pemecatan beberapa siswi di SMA 157 Rappang karena menolak melepas jilbabnya menggambarkan kontradiksi antara pidato Presiden yang menyatakan Indonesia menghargai ajaran agama dengan praktik sekularisasi di sekolah. Meskipun aturan yang melarang jilbab berasal dari kebijakan lokal, hal ini sangat melukai hati umat Islam. Kasus ini menunjukkan bahwa perjuangan mematuhi perintah Allah tidak selalu mudah, terutama dibandingkan dengan penerimaan

budaya seperti busana olahraga yang lebih terbuka di kalangan pelajar.

Sumber ini dianggap valid dan layak dipercaya karena ditulis pada masa yang sama dengan peristiwa yang dibahas, serta isinya sesuai dengan kejadian aslinya. Kredibilitas sumber ini juga terlihat dari pencantuman waktu terbit yang lengkap, seperti hari, tanggal, dan tahun, baik di bagian sampul maupun halaman-halaman beritanya.

3. Tempo. 19 Januari 1991. *Seragam Harus, Jilbab Boleh.*

Tulisan ini menyoroti perubahan sikap pemerintah yang mulai melonggarkan aturan tentang pemakaian jilbab di sekolah, setelah sebelumnya terjadi gelombang protes dan polemik di berbagai daerah. Tempo mencoba menampilkan dua sisi: di satu sisi, negara ingin mempertahankan aturan seragam sebagai bentuk keseragaman nasional; di sisi lain, tekanan masyarakat Muslim membuat negara mulai memberi ruang kompromi.

Sumber ini dianggap valid dan layak dipercaya karena ditulis pada masa yang sama dengan peristiwa yang dibahas, serta isinya sesuai dengan kejadian aslinya. Kredibilitas sumber ini juga terlihat dari pencantuman waktu terbit yang lengkap, seperti hari, tanggal, dan tahun, baik di bagian sampul maupun halaman-halaman beritanya.

2) Sumber Gambar

- a. Gambar di kolom opini Majalah Panji Masyarakat. No. 386, 1-11 Februari 1983. *Para Peserta Putri dengan Bangga Mengenakan Jilbab.* Gambar ini terdapat dalam tulisan Majalah Panji Masyarakat. Dalam gambar ini diperlihatkan beberapa para peserta putri yang tampil dengan percaya diri menggunakan jilbabnya sedang melakukan studi Islam di Bogor.

- b. Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 20 Oktober 1991. *Siswi Berkerudung sebuah SMA di Bandung*. Gambar ini terdapat dalam tulisan Majalah Tempo. Dalam gambar ini diperlihatkan beberapa siswi SMA Negeri di Bandung masih bertahan mengenakan jilbabnya dalam proses belajar ditengah ancaman hukuman bagi siswi yang mengenakan jilbab.
- c. Gambar di kolom opini Majalah Tempo. 19 Januari 1991. *Protes Siswi Berjilbab di Mahkamah Agung*. Gambar ini terdapat dalam tulisan Majalah Tempo. Dalam gambar ini diperlihatkan banyaknya siswi SMA berjilbab sedang melakukan aksi protes terhadap peraturan bebas jilbab di sekolah. Beberapa dari mereka membawa spanduk dengan berbagai tulisan slogan sebagai aksi perlawanannya.

3. Interpretasi

Penulisan sejarah yang telah melalui proses kritik, baik eksternal maupun internal, tidak akan dapat memberikan banyak informasi tentang suatu peristiwa jika tidak diolah lebih lanjut oleh peneliti melalui tahap interpretasi. Tahap ini adalah tahap yang sangat sensitif, di mana peneliti sejarah berpotensi menunjukkan bias yang cukup besar selama proses interpretasi. Oleh karena itu, para peneliti sejarah perlu melakukan analisis yang cermat dan mendalam untuk mengurangi segala kemungkinan munculnya subjektivitas selama tahap interpretasi.³⁰ Namun, tahapan ini penting bagi para penulis sejarah dalam mengungkap sebuah penelitian hingga menuangkannya menjadi sebuah tulisan, disamping penulis perlu memperhatikan konteks yang tajam untuk menghindari terjadinya subjektivitas.

Pembahasan mengenai Penolakan Umat Islam terhadap Pelarangan Jilbab dalam Pemberitaan Majalah Kiblat, Panji Masyarakat dan Tempo (1982-1991), untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka pada tahap ini penulis menggunakan teori analisis framing yang pertama kali dikemukakan oleh Erving Goffman pada tahun 1974 dan dipopulerkan oleh Eriyanto dalam tulisannya "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media". Framing merupakan

³⁰ John Arnold, "Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat", Penerjemah: Auliaul Fitrah Samsuddin, Yogyakarta: Basabasi, 2021, hlm. 89.

metode untuk memahami bagaimana media membentuk dan mengkonstruksi realitas. Proses pembentukan dan pengkonstruksian realitas menghasilkan elemen-elemen tertentu yang lebih mudah diidentifikasi. Analisis framing bertujuan untuk mengidentifikasi tema dalam suatu teks dan menunjukkan bahwa latar sosial budaya mempengaruhi cara seseorang dalam memahami sebuah peristiwa. Pada intinya, framing merupakan cara untuk memahami bagaimana media menyampaikan cerita tentang suatu peristiwa. Cara menyampaikan cerita tersebut tercermin dalam cara media memandang realitas yang dijadikan berita atau cerita. Pandangan ini memengaruhi hasil akhir dari pengkonstruksian realitas.³¹

Menurut Robert Entman (1993), framing bekerja melalui empat elemen utama, yaitu definisi masalah (bagaimana suatu isu dipahami), diagnosis penyebab (siapa atau apa yang dipandang bertanggung jawab), penilaian moral (penilaian moral tentang pihak yang terlibat), dan penyelesaian masalah (solusi atau tindakan yang diusulkan).³² Maka elemen-elemen tersebut dapat membantu memahami bagaimana isu pembahasan akan dipersepsikan dan dikonstruksi dalam media.

Analisis framing dalam konteks ini sangat relevan untuk memahami hubungan antara pemberitaan dan ideologi media tersebut. Dengan menggunakan analisis ini, peneliti dapat melihat bagaimana Panji Masyarakat memposisikan kelompok yang tertindas, yakni kaum perempuan muslimah, serta bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan sebagai tindakan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kebebasan beragama.

Selain *Panji Masyarakat*, penelitian ini juga menempatkan *Majalah Kiblat* dan *Tempo* sebagai objek kajian framing untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana media-media dengan latar ideologi yang berbeda mengkonstruksi realitas kebijakan pelarangan jilbab. *Majalah Kiblat*, yang secara tegas berdiri dalam posisi Islam konservatif, menggunakan pendekatan pemberitaan yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Dalam edisi 8 September 1984, mereka menyoroti pelarangan jilbab sebagai pelanggaran hak beragama, sekaligus

³¹ Eriyanto, *“Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media”*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm.10.

³² Robert Entman, *“Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”*, dalam *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51-58.

sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dialami siswi-siswi Muslimah. Framing yang dibangun menempatkan negara sebagai aktor represif dan umat Islam sebagai pihak tertindas, sehingga menciptakan narasi yang memperkuat wacana resistensi terhadap negara sekuler.³³

Sementara itu, *Panji Masyarakat* cenderung menampilkan pendekatan yang lebih naratif dan personal. Dalam beberapa edisinya, seperti No. 578 tahun 1988, majalah ini mengangkat kisah nyata siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena memakai jilbab. Dengan memfokuskan pada pengalaman individual yang menyentuh emosi, *Panji Masyarakat* membangun konstruksi yang menjadikan jilbab bukan sekadar pakaian, melainkan simbol perjuangan spiritual dan identitas keislaman. Kebijakan pemerintah ditampilkan sebagai bentuk sekularisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah, sementara para siswi berjilbab diposisikan sebagai pejuang hak asasi dan kebebasan beragama.³⁴

Berbeda dari kedua media tersebut, *Tempo* sebagai majalah umum dengan karakter jurnalisme sekuler, menyajikan framing yang lebih ambivalen. Dalam edisi 19 Januari 1991 berjudul "Seragam Harus, Jilbab Boleh", *Tempo* membingkai pelarangan jilbab sebagai ketegangan antara norma keseragaman pendidikan dan hak individu dalam mengekspresikan keyakinan agama. Di satu sisi, media ini berusaha menjaga posisi netral, tetapi di sisi lain narasi yang dibangun masih mengafirmasi posisi negara sebagai penjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan demikian, *Tempo* tidak secara frontal menolak kebijakan pemerintah, melainkan menawarkan kompromi sebagai solusi, yang dalam kerangka framing justru memperlihatkan bias terhadap wacana dominasi negara.³⁵

Bila dianalisis dengan menggunakan teori framing Robert Entman, maka ketiga media tersebut merepresentasikan realitas yang sama, yakni pelarangan jilbab dengan bingkai yang berbeda-beda. *Kiblat* memandang isu ini sebagai bentuk represi terhadap Islam, *Panji Masyarakat* sebagai simbol perjuangan keagamaan dan martabat perempuan Muslim, sedangkan *Tempo* sebagai dilema normatif antara

³³ *Kiblat*, 8 September 1984. "Kerudung Lagi: Mana Toleransi Itu?"

³⁴ *Panji Masyarakat*, No. 578, 11–20 Juni 1988. "Kasus Jilbab yang Memilukan."

³⁵ *Tempo*, 19 Januari 1991. "Seragam Harus, Jilbab Boleh."

hak dan tata tertib nasional. Masing-masing konstruksi tersebut merefleksikan tidak hanya keberpihakan media, tetapi juga nilai-nilai ideologis yang mereka anut, serta posisi mereka dalam lanskap sosial-politik masa Orde Baru.

Dari konstruksi yang beragam tersebut, dapat dipahami bahwa media tidak hanya melaporkan kenyataan, tetapi juga menciptakan makna atas realitas yang mereka pilih dan sorot. Dalam konteks polemik jilbab ini, framing yang dibangun oleh media menjadi bagian integral dari proses resistensi sosial. Melalui pemberitaan yang mengandung unsur moral, politis, dan identitas, media seperti *Kiblat* dan *Panji Masyarakat* berperan aktif dalam membentuk opini publik dan memperluas ruang wacana keagamaan yang selama ini ditekan oleh negara.³⁶

4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah tahap penulisan atau historiografi. Pada tahap ini, berbagai sumber yang telah dikumpulkan dan diseleksi melalui proses verifikasi serta interpretasi disusun secara sistematis menjadi sebuah narasi sejarah.³⁷ Dalam konteks penelitian mengenai *Reaksi Penolakan Umat Islam terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Jilbab Tahun 1982–1991*, penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan rangkaian fakta secara terstruktur dan mudah dipahami.

Struktur historiografi dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Bab I memuat uraian pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian sejarah. Metode yang digunakan mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga penulisan sejarah.

Bab II “Awal Mula Munculnya Kebijakan Larangan Penggunaan Jilbab di Indonesia Tahun 1982-1991” membahas secara kronologis kebijakan pelarangan jilbab di Indonesia pada periode 1982 hingga 1991 secara periodik beserta konteks sosial-politiknya. Bab III “Penolakan Umat Islam terhadap Kebijakan Pelarangan

³⁶ Rahardjo, M., *Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015. Hlm. 123,

³⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014. Hlm. 147-150.

Jilbab dalam Pemberitaan Majalah Kibat, Panji Masyarakat, dan Tempo (1982-1991)”. Bab IV berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting dari keseluruhan pembahasan sebelumnya.

